



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

2200/2200/KP.02.02/03/2024

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Usulan Penyesuaian Rencana Hasil Kerja (RHK) di E-Kinerja BKN untuk Mengakomodir Penilaian Kinerja Pegawai
Tanggal : 01 Maret 2024

Dengan hormat, sehubungan dengan penerapan E-Kinerja BKN sebagai media pelaporan dan penilaian kinerja bulanan pegawai, dan adanya mutasi pegawai di berbagai unit kerja, kami sampaikan hal-hal berikut:

A. Pengertian Umum (Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN)

1. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai (sesuai SK Jabatan terakhir pegawai) dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Berikut adalah rincian lebih lanjut:

No	Pejabat Penilai Kinerja	Pegawai yang di nilai
1	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional tiap jenjang di unit kerjanya
2	Pejabat Eselon III	Pejabat eselon IV
3	Pejabat Eselon IV	Pelaksana dan PPPK

2. Pejabat Pemilik Kerja adalah atasan langsung tempat pegawai yang ditugaskan melalui Surat Tugas (ST) penempatan.

B. Kondisi

1. Pejabat Penilai Kinerja pegawai di E-Kinerja BKN tersinkronisasi berdasarkan data pegawai di SIASN BKN.
2. SIASN BKN hanya bisa diupdate berdasarkan SK Jabatan terakhir pegawai, bukan berdasarkan ST penempatan.
3. Bagi pegawai yang dimutasi melalui ST, maka Pejabat Penilai Kinerjanya tetap mengacu pada unit kerja sesuai SK Jabatan terakhir, namun **penilaian kinerja** bulanan dan tahunannya diberikan **berdasarkan rekomendasi** dari Pejabat Pemilik Kerja.



4. Terdapat 35 pegawai yang Pejabat Penilai Kinerjanya berbeda dengan unit kerja penempatan (Lampiran 1).
5. Sehubungan dengan penempatan pegawai berdasarkan ST tersebut, kami sampaikan bahwa muncul permasalahan terkait pelaporan dan penilaian kinerja sebagai berikut:

No	Permasalahan	Usulan Solusi
1	<p>Promosi dan mutasi dari bulan Januari sampai saat ini, bersamaan dengan masa transisi dari SKP Dashboard ke E-Kinerja BKN.</p> <p>Sedangkan data pegawai sudah disinkronisasi di SIASN dan E-Kinerja BKN sesuai dengan SK Jabatan terakhir masing-masing pegawai.</p> <p>Namun muncul kebingungan dalam mengisi SKP Bulan Januari dan Februari, karena atasan yang telah berubah sementara RHK atasan baru tidak relevan dengan kinerja sebelum mutasi.</p>	<p>Pada masa transisi dari SKP Dashboard ke E-Kinerja BKN ini, pegawai mengisi RHK Tahunan dan SKP Bulanan dengan menggunakan jabatan terbaru.</p> <p>Kinerja sebelum mutasi tetap dapat dilaporkan di Renaksi dan Realisasi Bulanan.</p>
2	<p>Muncul pertanyaan terkait hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siapa yang berwenang menjadi Pejabat Penilai Kinerja, mengingat banyaknya pegawai yang dimutasi berdasarkan ST, sementara Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan SIASN dan E-Kinerja BKN harus berdasarkan SK Jabatan terakhir. - PK dan RHK Pejabat Penilai Kinerja tidak relevan dengan kinerja pegawai yang ditempatkan melalui ST di unit kerja baru, khususnya untuk pegawai dengan kriteria berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) JF yang ditempatkan di unit kerja lain berdasarkan ST, sedangkan penempatannya tidak sesuai dengan peta jabatan. b) Pegawai yang dimutasi dengan menggunakan ST untuk mengantisipasi turunnya kelas jabatan. c) PNS baru (lulusan STAN) yang dimutasi dengan ST, sedangkan penempatannya tidak sesuai dengan peta jabatan. 	<p>Untuk jenis pekerjaan pegawai yang tidak relevan dengan RHK Pejabat Penilai Kinerjanya, maka kami usulkan agar setiap struktural menambahkan 1 RHK generik sebagai acuan, sehingga memudahkan pegawai dalam melakukan pelaporan kinerja bulanan.</p>



No	Permasalahan	Usulan Solusi
3	Terdapat pegawai yang pangkat golongannya sama atau lebih tinggi dari atasan langsung yang merupakan Pejabat Penilai Kinerjanya sesuai SK.	Pejabat Penilai Kinerjanya diubah menjadi atasan yang pangkat golongannya lebih tinggi, untuk mengantisipasi ditolaknya nilai SKP pegawai saat kenaikan pangkat.

C. Saran

1. Pejabat struktural eselon II, III, IV yang pegawainya di tempatkan di unit kerja lain melalui ST, perlu untuk menyesuaikan RHK sebagai acuan indikator kinerja bawahannya.
2. Pegawai yang mengalami mutasi perlu membuat Perjanjian Kinerja (PK) Baru sebagai panduan dalam mengisi Rencana Hasil Kerja (RHK) di E-Kinerja BKN.
3. Kami lampirkan usulan RHK generik yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RHK yang bisa mengakomodir pelaporan kinerja pegawai yang dimutasi melalui ST Penugasan (Lampiran 2). **Usulan RHK tersebut juga sekaligus dapat mengakomodir pelaporan kinerja terkait pelaksanaan tugas pada Gugus Tugas Dalam Rangka Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.**
4. Berdasarkan kebutuhan penyesuaian tersebut, kami akan membuka jangka waktu pelaporan dan penilaian kinerja Bulan Januari dan Februari di E-Kinerja BKN s.d. 15 Maret 2024.
5. Terlampir Data Penempatan Pegawai berdasarkan SK dan ST terakhir. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penentuan pejabat penilai kinerja di E-Kinerja BKN.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut. Apabila Bapak tidak berpendapat lain, mohon ijin agar Nota Dinas ini kami sebarkan ke setiap unit kerja. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi
Sri Handayani

Tembusan Yth.:
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Lampiran 1.

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN (PEJABAT PEMILIK KERJA)	PEJABAT PENILAI KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
1	William Ivan Nathanael Panggabean, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Program dan Anggaran	Kepala Sub Bagian Verifikasi
2	Yati Suryati, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Kepala Sub Bagian Verifikasi
3	Ahmat Khoirudin, A.Md.	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan	Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI				
4	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
5	Hatika Al Shafa, S.Sos.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
6	Naria Nindya Dewati, A.Md.	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil	Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN				
7	Juliana Tikka Murni, S.E., M.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	JF Pasti Ahli Utama (Wiryanto)	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
8	Nuzul Qur'aini Mardiyah, S.H., M.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	JF Pasti Ahli Utama (Ida Ria Tambunan)	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
9	Hersinta Setiarini, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	JF Pasti Ahli Utama (Wiryanto) dan Petugas RPH	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
10	Edwin Aditya Irawan, S.Psi.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	JF Pasti Ahli Utama (Wiryanto)	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
11	Ganggas Wibisono, S.Sos., M.Sc.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sub Bagian Hukum	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
12	Faizal Fajar Insani, S.A.P.	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Fasilitas Persidangan	Kepala Biro Umum
13	Rifqi Setiadi, A.Md.MRA.	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan	Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
14	Ninie Widiyanti, S.H., M.A.P	Sekretaris Hakim Konstitusi pada Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan (Pengolah Data Perkara dan Putusan pada Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
15	Donny Yuniarto, S.A.P.	Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra	Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan (Pengolah Data Perkara dan Putusan pada Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan



NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN (PEJABAT PEMILIK KERJA)	PEJABAT PENILAI KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL				
NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	PENILAI KINERJA
16	Rita, S.H., M.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
17	Riani Anggraini, S.H.	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan
18	Hermita Uly Artha Sinurat, S.E., M.Si.	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris pada Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic)	Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan
19	Hari Kusuma Yuda Tama, S.I.P.	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris pada Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo)	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
20	Bangkit Panji Anarogo, S.Pd., M.Pd.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris pada Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur)	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
21	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris pada Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra)	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
22	Aditya Yuniarti, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris pada Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani)	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
23	Sherly Octaviana Sari, S.Sos., M.A.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris pada Sekretaris Jenderal)	Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap AACC
24	Dewi Rahmawati, S.A.P	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris pada Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih)	Kepala Biro Umum
25	Muhamad Doni Ramdani, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Anwar Usman)	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan



NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN (PEJABAT PEMILIK KERJA)	PEJABAT PENILAI KINERJA
26	Prana Patrayoga Adiputra, A.Md.	Petugas Protokol	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani)	Kepala Sub Bagian Protokol
27	Muhammad Halim, S.Kom.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan (Sekretaris Sekretaris Jenderal)	Kepala Biro Umum
28	Ujang Wahyu	Pengelola Kendaraan	Sub Bagian Protokol	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
29	Farhan Atha Nugraha, A.Md.MRA.	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Protokol	Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
BIRO UMUM				
30	Novena Jati Nugraha	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
INSPEKTORAT				
NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	PENILAI KINERJA
31	Elin Asrofah Qibtiah, S.Pd, M.Pd	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat (Analisis Tata Usaha)	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
32	Khur'in Kurnia Putri, S.E.	Penyusun Laporan Hasil Diklat	Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat (Analisis Tata Usaha)	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan
33	Afifah Larasati, A.Md.MRA.	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat (Analisis Tata Usaha)	Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN				
34	Supriyanto, S.H.	Pengelola Persidangan	Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI				
35	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Pranata Komputer Ahli Madya	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi



Lampiran 2.

Usulan Rencana Hasil Kerja (RHK) Generik

Eselon II

Rencana Hasil Kerja (RHK) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Aspek	Target
Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administasi umum dan administrasi yustisial	Persentase Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administasi umum dan administrasi yustisial	Kuantitatif	100%

Eselon III

RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	Rencana Hasil Kerja (RHK) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Aspek	Target
Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administasi umum dan administrasi yustisial	Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administasi umum dan administrasi yustisial	Persentase Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administasi umum dan administrasi yustisial	Kuantitatif	100%

Eselon IV

RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	Rencana Hasil Kerja (RHK) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Aspek	Target
Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administasi umum dan administrasi yustisial	Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administasi umum dan administrasi yustisial	Persentase Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administasi umum dan administrasi yustisial	Kuantitatif	100%



Pelaksana

RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	Rencana Hasil Kerja (RHK) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Aspek	Target
Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administrasi umum dan administrasi yustisial	Menyesuaikan dengan hasil kerja yang diberikan pada pegawai di unit kerja penempatannya	Menyesuaikan dengan indikator kinerja pada unit kerja penugasan	Kuantitatif	100%

Jabatan Fungsional

RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	Rencana Hasil Kerja (RHK) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Aspek	Target
Terselenggaranya direktif pimpinan dalam pelaksanaan tugas dukungan layanan administrasi umum dan administrasi yustisial	Menyesuaikan dengan hasil kerja yang diberikan pada pegawai di unit kerja penempatannya	Menyesuaikan dengan indikator kinerja pada unit kerja penugasan	Kuantitatif	100%

